

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM UPAYA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Adelia Puspa Andini

Nim : 22 2014 277

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM UPAYA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Adelia Puspa Andini
Nim : 22 2014 277**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Puspa Andini

Nim : 22 2014 277

Program Studi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya serta sanksi hanya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Palembang, 2020

Yang membuat pernyataan,



Adelia Puspa Andini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan
Otonomi Daerah Kota Palembang
Nama : Adelia Puspa Andini
NIM : 22 2014 277
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal 2020

Pembimbing I,

Betri, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II,

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
U.L. Ketua Program Studi Akuntansi



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO

- ❖ *Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*

(Adelia Puspa ANdini)

Terucap syukur pada mu Allah SWT

Ku persembahkan untuk:

- ❖ *Papa dan Mamaku Tercinta*
- ❖ *Dosen pembimbingku*
- ❖ *Teman-temanku*
- ❖ *Almamaterku*

PRAKATA



Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang“ skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, papaku (Fredy Wijaya), mamku (Jamilah Riany), saudaraku yang telah memberikan dorongan semangat, dan doa yang selalu diberikan serta panjatkan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Betri Sirajuddin S.E., M.Si., Ak.,CA dan juga ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran dan proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri Sirajuddin, SE, M.Si, AK, CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua Program dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mella Handayani S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh pimpinan, Staf Pengajar (Dosen), serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing penulis selama mengikuti kuliah dan kegiatan lain.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah membantu penulis dalam pengambilan data dan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2020

Penulis,

Adelia Puspa Andini

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN /COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Pendapatan Asli Daerah	15
2. Otonomi Daerah	20
B. Penelitian Sebelumnya	23

BAB III METODELOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data Yang Diperlukan.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Analisis dan Teknik Analisis.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	9
Tabel I.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah	10
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Palembang	61
Tabel IV.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	57
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 : Biodata Penulis
- Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 7 : Lembar Pengesahan Setelah Skripsi

ABSTRAK

Adelia Puspa Andini/222014277/2020/Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang. Tujuan adalah untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu menjelaskan dengan bentuk kalimat teori-teori yang mendukung dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi kota Palembang yang terjadi pada tahun 2014-2018. Pemerintah diharapkan agar lebih serius dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta lebih serius lagi dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan perusahaan yang tertib serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatra Selatan

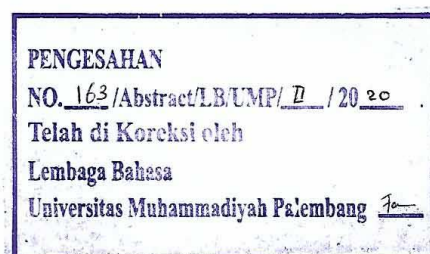
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Adelia Puspa Andini / 222014277/2020 / Analysis of Local Revenue (PAD) in the Implementation of the Regional Autonomy of Palembang City / Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this research was how the Regional Original Revenue (PAD) in the Implementation of Regional Autonomy in Palembang City. The purpose is to find out the Regional Original Revenue (PAD) in the Implementation of Regional Autonomy in Palembang City is. This study used analytical techniques to explain in the form of sentences of theories that support by giving a general picture in accordance with the reality. occurred in 2014-2018. The government was expected to be more serious in optimizing local revenue, and more seriously in overseeing regional financial management with an orderly company and increasing cooperation with related parties. The result of this study was that regional own-source revenue (PAD) is Simultaneously has an influence on financial performance, but partially only other legal PADs are dominantly affecting financial performance, while regional taxes, regional levies, and company results and regional wealth do not predominantly affect financial performance in district and city governments of South Sumatra.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Autonomy



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang di mulai tahun 2001 menurut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pendapatan dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat di pungut pajak retribusinya. Kemudian, di perlukan system pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dan desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien dan efektif.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Pada prinsipnya pemberian otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, adalah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah serta pelayanan publik akan dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang selanjutnya yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas mengenai materi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dapat kita katakan bahwa UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tap MPR RI Nomor XV/MPR/2000 yang secara khusus membahas perihal perimbangan keuangan pusat daerah.

Undang-undang ini merupakan bentuk penyesuaian dari pelaksanaan perimbangan keuangan yang mengikuti perkembangan zaman serta dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip kebijakan perimbangan keuangan yang menyeluruh dalam rangka pendanaan dari penyelenggaraan ketiga asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tujuan pembantuan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang terakhir kita bahas yaitu Undang-Undang Tahun 2014. Undang-undang ini revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam Undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah Negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan (baik yang berupa klasifikasi urusan pemerintahan, urusan pemerintah absolute, urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum).

Undang-undang ini juga membahas mengenai adanya Forkopimda, yaitu forum koordinasi Pemimpin daerah yang bermanfaat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Selain itu, UU ini juga membahas kekhususan wewenang daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan suatu strategi yang bertujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu berupa *sharing of power*, *distribution of income* dan *kemandirian system manajemen di daerah*. Kedua, otonomi daerah dimaksud sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat : pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membudidayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Keempat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kelima, mengembangkan dan memajukan potensi yang sesuai dengan kemampuan dan kehendak masyarakat lokal dan seluruh stakeholder daerah. Keenam, mendidik dan menciptakan kader-kader

pimpinan daerah yang bertanggungjawab, jujur, dan disiplin serta respon terhadap tuntutan dan apresiasi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di pandang salah satu indikator atau kreteria untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Marihot (2010: 627) Jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari : (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang di sediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-undang No 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah

yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang di maksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan adalah bagian dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Salah satu sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan disuatu daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Pentingnya sumber dana tersebut diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaannya yaitu melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutannya. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pemungutan pajak (Halim, 2014 : 171). Upaya untuk peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun exstensifikasi. Salah satu cara tersebut adalah dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya (Halim, 2010 : 153).

Menurut Utang (2015:396) Pendapatan daerah adalah Sejumlah uang yang di terima daerah, baik atas hasil usahanya maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Luigi Laurens Derosario Berwulo (2017) Berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Tahun (2017). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pendapatan asli Daerah di kota Jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus menerus setiap tahunnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tyasani Taras (2017). Berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Badung Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi pajak daerah kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektifitas pajak daerah kabupaten badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Abid Muhtarom. Berjudul Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015,(2015). Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini di harapan dapat memberikan penjelasan tentang

bagaimana analisis PAD terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lamongan.

Badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang sebagai unsur pelaksanaan dibidang PAD dan pendapatan lainnya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan di pemerintah Kota Palembang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan disentralisasi di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan penggabungan bagian keuangan dan bagian perlengkapan.

Pemerintah kota Palembang sejak diberikan kewenangan atas pelaksanaan dan pengaturan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun semakin berupaya meningkatkan PAD. Dalam upaya meningkatkan PAD permasalahan yang sering terjadi adalah hasil dari realisasi sumber-sumber PAD tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah untuk meningkatkan otonom daerah dalam mencapai kesejahteraan ,masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2014-2018 secara keseluruhan terkait anggaran diduga masih belum menunjukkan adanya peningkatan realisasi terhadap target anggaran

dalam pelaksanaannya dan mengalami fluktuasi atau tidak stabil nya anggaran pada setiap tahunnya seperti yang di uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang Tahun
2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2014	753.849.902.820,25	734.256.304.690,46	97,40%
2015	749.544.182.021,08	736.926.505.928,21	98,32%
2016	840.572.306.099,31	781.346.935.715,23	92,95%
2017	1.099.308.967.841,03	1.091.704.605.854,90	99,31%
2018	1.100.505.155.700,04	953.257.612.130,74	86,62%

Sumber : BPKAD Kota Palembang 2020

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang mengalami Fluktuatif setiap tahunnya, dimana Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2017 mencapai target sebesar 99,31%, penerimaan terendah pada tahun 2018 yaitu hanya mencapai target 86,62%.

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kota Palembang melakukan berbagai upaya-upaya di dalam meningkatkan perolehan PAD. Peningkatan perolehan ini disebabkan karena faktor dana merupakan penentu dalam mengetahui lancar tidaknya suatu pemerintah. Kemampuan dalam pendanaan Kota Palembang

terbatas maka akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat ikut terhambat. Tidak banyak yang dapat dilakukan jika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adanya keterbatasan sumber PAD dimana akan menyebabkan pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal.

Era otonomi pemerintah dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Potensi-potensi daerah yang tersedia diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik agar pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya PAD. PAD akan diperoleh dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah yang dapat dioptimalkan dengan baik.

Tabel I.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
dari Tahun 2014-2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Pajak Daerah	463.574	536.552	479.112	680.012	721.012
Pendapatan Retribusi Daerah	85.109	75.946	75.646	59.805	48.055
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.021	50.365	34.503	61.860	62.318
Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	157.550	118.485	147.663	290.026	121.870

Sumber : BPKAD Kota Palembang 2020

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan daerah karena pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD, tanpa adanya pajak daerah kebutuhan akan dana yang diperlukan untuk

pembangunan daerah sulit terpenuhi. Permasalahan mengenai pajak daerah harus dapat ditangani secara tepat agar pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan tabel I.2 dari Tahun 2014-2018 pendapatan pajak daerah itu semakin meningkat, akan tetapi masih ada unsur pajak daerah yang belum mencapai target seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lingkungan (PBB Perkotaan), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Tidak dengan pendapatan retribusi daerah dari tahun 2014-2018 yang semakin menurun yang di sebabkan oleh beberapa unsur retribusi daerah yang belum mencapai target, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pemberian izin mendirikan bangunan, retribusi pengambilan sampah dari sumber nya ke lokasi pembuangan sementara, retribusi penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan itu mengalami fluktuasi di tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan, di tahun 2016 kembali mengalami penurunan, di tahun 2017-2018 kembali mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan oleh beberapa unsur pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang belum mencapai target seperti, bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Musi, bagian laba atas penyertaan modal pada PD Pasar Palembang Jaya, bagian laba atas penyertaan modal pada PT Sarana Pembangunan Jaya.

Berdasarkan pendapatan asli daerah yang sah itu juga mengalami fluktuasi dari 2014 ke 2018 mengalami penurunan, di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 kembali lagi mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa unsur lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti jasa giro kas daerah, penerimaan bunga deposito, pendapatan dari pengambilan pasal penghasilan pasal 21, lain-lain pendapatan BLUD RSUD Bari, pendapatan jasa-jasa layanan umum BLUD di tahun 2018.

Sumber-sumber dari PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel I.2 dapat dilihat bahwa hasil pajak daerah memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD di Kota Palembang. Tahun 2014-2018 hasil pajak daerah selalu mengalami Fluktuasi. Besarnya penerimaan pajak daerah disebabkan adanya komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada pajak daerah.

Faktor yang menyebabkan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan asli daerah yang sah mengalami Fluktuasi disebabkan beberapa faktor antara lain penetapan target yang kurang realistis, kurangnya pengawasan, dan belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki. Selain itu, diperlukan juga kemampuan menekan biaya yang

dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan yang dimiliki akan memperbesar penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian adalah bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk memaham Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah kota Palembang.

2. Bagi BPKAD Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan acuan atau kajian penulisan dimasa yang akan datang dan untuk penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Muhtarom. 2015. Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015, Vol XIII, No1,2015.
<https://journal.unsila.ac.id/pdf/7abid>
- Aulia Afafiun Nisa. 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Vol 1,Jilid 2, 2017.
<https://ejournal.unm.oc.id/index.php/jie/article>
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 10 No.1, Mei 2014, Hal. 1-9. Diakses pada 23 November 2018, administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.
- Cherrya Dhia Wenny. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan, Vol 2, No 1, September 2012.
<http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/676>
- Damas Dwi Anggoro, S,AB,MA. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama. Malang: UB Press.
- Luigi Laurens Derosario Berwulo. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. Vol 17, No 01. Tahun 2017.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article>
- Marihot Pahala Siahaan, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Rajawali Pers.
Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 26. Bandung: Alfabeta.
- Tyasani Taras,dkk. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. Vol 6. No. 5. Mei 2017
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemern/article/view/28206>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses Pada 18 Oktober 2018, dari file C://Users/Romi/Favorite/Download/UU0233014.pdf
- V. Wiratna Sujarweni (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press